

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh: **GIOVANY BAPTISTA AUGUSTA BRILIANTINE & ANYUALATHA HARIDISON**

ABSTRACT

One of disasters which often happens in dry season in Central Borneo is forest and land fires in areas which is owned by the people, plantation area, HPH area, HTI area and even protected area. Parts of the fire are because of the preparation that is done by the people by using the fire. From the condition, the prevention readiness and control of related parties in avoiding forest and land fires are needed in Central Borneo Province. The research aimed to: 1) to find out the implementation of Local Regulation number 5 in 2003. 2) to find out the obstacles of Forestry Department of Central Borneo Province in implementing The Local Regulation Number 5 in 2003. This research used descriptive qualitative data as the main data source. Data was collected by observation technique, interview and documentation. The technique to analyze the data used Miles and Huberman Model. Based on the result and discussion of the study, it could be drawn the conclusions as follows: 1) The implementation of Local Regulation Number 5 in 2003 has not been effective yet as operational to control forest and land fires because of the lack of infrastructure, the lack of human resources in the field and the lack of budget. 2) The indicator of communication was not run well between Department of Forestry and the people because there was miscommunication. 3) the resources in Department of forestry's office has run well because there were information staff, authority and facility. 4) there was disposition including insentive and bureaucrat. 5) bureaucrat structures covered SOP and clear fragmentation. Suggestion 1) The related department which control the problem of forest and land fires is expected to work harder and more socialize or do the training practice to the people.

Keywords: Implementation of Local Regulation, Control of Forest and Land Fires, Department of Forestry.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mencatat beberapa kali kebakaran hutan hujan tropis terbesar dalam sejarah, yaitu pada 1982-1983, 1994-1995, dan 1997-1998 dan semenjak itu kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun yang menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk kehilangan biodiversitas. Sejak kebakaran hutan tahun 1997-1998, kebakaran merupakan ancaman yang serius terhadap hutan gambut di Indonesia. Pada saat bencana nasional itu Tacconi (2003) dalam Wibisono dkk (2005:12-13) mencatat seluas 2,12 juta hutan rawa gambut rusak

berat akibat kebakaran. Tidak hanya kerusakan lingkungan dan kehilangan biodiversitas, asap dan polusi sebagai akibat dari kebakaran juga mengganggu masyarakat Indonesia, dan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Brunai, dan Siangapura.

Salah satu bencana yang paling sering terjadi pada musim kemarau di Kalimantan Tengah adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran ini terjadi biasanya di areal milik masyarakat areal perkebunan, areal HPH (hak pengelolaan/pengusahaan hutan), areal HTI (hutan tanaman industri), bahkan di kawasan lindung. Sebagian kebakaran ditimbulkan oleh kegiatan penyiapan lahan oleh masyarakat dengan menggunakan api. Teknik penyiapan lahan melalui pembakaran masih dianggap sebagai cara yang paling murah dan praktis sehingga beberapa perusahaan perkebunan dan HTI (hutan tanaman industri) dengan alasan lebih ekonomis masih melakukannya sekalipun secara hukum telah dilarang. Berdasarkan fakta yang ada, hampir semua kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh kegiatan manusia (secara sengaja maupun tidak) dan belum ada bukti kebakaran yang terjadi secara alami.

Khusus pada kawasan hutan dan lahan yang berada di kawasan bergambut, kebakaran akan memberikan dampak yang luas terhadap ekosistem. Pembukaan hutan di kawasan bergambut untuk keperluan pembangunan biasanya diikuti dengan pembuatan drainase. Tindakan ini menyebabkan kawasan gambut menjadi cepat kering dan akan mudah terjadinya kebakaran terutama pada musim kemarau. Bank Dunia mencatat total kerugian yang dialami pada kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 mencapai Rp 221 triliun dengan luas mencapai 2,6 juta hektar. Beberapa daerah bahkan mengalami perlambatan ekonomi pada triwulan III tahun 2015. Daerah tersebut antara lain; Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Kalimantan merupakan daerah yang paling parah terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Khusus Kalimantan Tengah terjadi perlambatan ekonomi dari 7% menjadi 6,7%. Total kerugian ekonomi di Kalimantan Tengah pada periode Juni-Oktober 2015 mencapai 33,8 triliun rupiah (World Bank, 2016) dalam (Dinas Kehutanan, 2017).

Melihat kondisi tersebut, kesiapan pencegahan dan pengendalian tersebut alangkah baiknya kesiapan pemerintah daerah bersama dengan para pihak dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah disamping upaya-upaya pencegahan dan pengendalian, diharapkan dapat diarahkan untuk mengkaji penyebab terjadinya kebakaran merupakan salah satu yang tidak bisa dianggap remeh dan merupakan kajian startegis dalam menghentikan dan mengurangi kabakaran hutan dan lahan, jika kita lihat bahwa hutan/lahan gambut berada pada ketebalan gambut yang berbeda, tingkat ketebalan gambut menjadi sesuatu yang penting dalam pengeolaan hutan gambut agar pemanfaatan yang lestari dan dapat memberi manfaat ekonomi yang baik dan berkesinambungan. Dengan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dalam Subarsono (2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Pelaksana Kebijakan

Menurut Said Zainal Abidin (2004) dalam Herabudin (2016:42-44), kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. *Kebijakan umum.*
- b. *Kebijakan pelaksanaan.*
- c. *Kebijakan teknis.*

Secara teknis, Lembaga Administrasi Negara (2003) memberikan batasan tingkat-tingkat kebijakan pemerintah di Indonesia sebagai berikut.

1. *kebijakan nasional*
2. *Kebijakan umum*
3. *kebijakan pelaksanaan*

setingkat Menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan dan instruksi pejabat.

1. *kebijakan umum daerah*
2. *kebijakan pelaksanaan*

Dalam garis besar, stakeholder kebijakan publik dapat dibedakan kedalam tiga kelompok (Putra:2005) dalam (Suharto,2013:25) :

1. *stakeholder kunci.*
2. *stakeholder primer.*
3. *stakeholder sekunder.*

Konsep Implementasi

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006:81) dalam Pasolong (2014:57-58), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat di lihat sendiri betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksanaan yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Model Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

2. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Sedangkan model implementasi kebijakan publik yang lain yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

3. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

4. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model ke empat yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementatiaon as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Indikator Implementasi Kebijakan

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin (1986) dalam Herabudin (2016:142-143) didasarkan pada tiga aspek, yaitu :

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang di kehendaki dari semua program yang ada terarah;

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat juga di gagalkan oleh beberapa faktor penghambat. Aspek-aspek ini biasanya disebut sebagai jebakan implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*).

- a. Speifikasi yang tidak lengkap..
- b. Lembaga yang tidak tepat.
- c. Konflik tujuan.
- d. Kegagalan insentif.
- e. Kurang kompeten.
- f. Sumber daya tidak memadai.
- g. Kegagalan komunikasi.

Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu Badan/Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun keputusan Kepala Daerah adalah naskah Dinas berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk memperoleh data dari masalah yang diteliti, maka peneliti memilih lokasi di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di jln. Imam Bonjol Nomor 1A Palangka Raya. Alasan peneliti memilih Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah karena menurut peneliti instansi tersebut salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah hutan dan lahan yang ada di lingkungan Kalimantan Tengah khususnya. Disamping itu topik penelitian yang diangkat peneliti berhubungan dengan instansi tersebut sebagai subjek dari penelitian peneliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka ada beberapa hal yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah :

- a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan hanya saja secara operasional masih belum bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Hal tersebut karena masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia yang ada dilapangan.
- b. Sedangkan bila di lihat dari teori Georgi C. Edaward III :
 - Untuk komunikasi meliputi tranmisi, kejelasan, konsistensi sudah berjalan baik antar pelaksana di Dinas Kehutanan sendiri. Sedangkan ke masyarakat masih kurang
 - Untuk sumber daya meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi dan sudah baik, hanya saja yang jadi masalah ketersediaan sarana dan prasarana di lapangan yang mengalami kekurangan.
 - Untuk disposisi melingkupi pengangkatan birokrasi dan insentif sudah ada dan sedang berjalan.
 - Sedangkan untuk struktur birokrasi meliputi SOP dan Fragmentasi sudah ada dan pada masing-masing kegiatan.
- c. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah :
 - Adanya kerjasama antara lintas instansi terkait kegiatan pembakaran akan mempermudah penanganan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini saling mencukupi satu sama lain dalam hal pengandaan alat maupun koordinasi serta langkah-langkah untuk penanganan.
 - SOP yang jelas dalam setiap kegiatan sangat diperlukan untuk pelaksana kebijakan karena itu akan menjadi standard serta pedoman untuk pelaksanaan. Sehingga mempersempit adanya penyelewengan serta pelanggaran dalam pelaksanaan.
 - Dengan adanya insentif pada masing-masing kegiatan memotivasi pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - Dengan di dukungnya SDM yang berkompeten di bidangnya akan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan karena pelaksana tahu apa yang harus di kerjakan sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh atasan untuk dilaksanakan .
- d. Adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan :
 - Dapat di lihat jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan terutama untuk bagian penyuluhan hanya mempunyai 48 orang dengan luasan wilayah Kalimantan Tengah serta satu seksi yang

membawi 5 orang saja untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- Ketersediaan anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan kebijakan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan tertentu. Oleh sebab itu anggaran sangat berperan penting karena anggaran memainkan banyak hal salah satunya untuk pendanaan suatu kegiatan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- Serta Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan akan berakibat terhadap hasil yang di inginkan dari keberhasilan suatu kebijakan. Contoh, dalam hal pengadaan alat pemadaman sangat diperlukan untuk penanganan dilapangan tanpa alat bagaimana memadamkan api.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan masih belum efektif secara operasional mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dilapangan, kurangnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana dilapangan. Dengan mengindikasi kebakaran yang terjadi pada Tahun 2006 dan 2015 yang menjadi salah satu bukti bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini dianggap masih belum bisa mengendalikan kebakaran di Kalimantan Tengah dimana titik panas di Kalimantan Tengah bertambah naik dari Tahun 2006 dan semakin naik pada Tahun 2015. Berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki indikator yang terpenuhi dan belum terpenuhi. Indikator-indikator yang terpenuhi antara lain :

- a. Sudah terjalinnya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan bidang dan seksi yang khusus menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan yang menangani peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal ini bidang dan seksi penyuluhan. Sedangkan komunikasi antara Dinas Kehutanan dengan masyarakat masih kurang baik karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan tidak adanya pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan perwakilan dari setiap Kabupaten ataupun Desa yang sudah mengikuti sosialisasi maupun pelatihan melakukan sosialisasi kembali kemasyarakat ataupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri yang melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat umum yang ada di Tumbang Nusa.
- b. Sudah tersediannya sumber daya untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini baik staf, informasi, wewenang, dan fasilitas di Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah sendiri. Sedangkan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah yang di lapangan dalam hal ini staf yang melakukan pemadaman dan fasilitas yang digunakan dalam pemadaman masih sangat kurang hal ini disebabkan salah satunya kurangnya anggaran yang disediakan untuk penyediaan fasilitas dan pemberian insentif serta jaminan-jaminan lainnya untuk staf yang melakukan pemadaman dilapangan.

- c. Terdapat pengangkatan birokrat dalam implementasi Peraturan Daerah ini dengan dibuktikan adanya bidang maupun Seksi yang khusus menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan maupun peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan.
- d. Adanya SOP yang jelas untuk setiap kegiatan dan program yang dibuat maupun yang dilaksanakan sedangkan fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam implementasi Peraturan Daerah ini sudah sangat jelas dengan adanya pembentukan Bidang-Bidang maupun Seksi yang khusus menangani masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Saran

1. Perlu adanya penambahan SDM untuk bidang penyuluhan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik dilapangan. Dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mencukupi akan menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih baik.
2. Di harapkan untuk kedepannya pemerintah Daerah lebih memfokuskan anggaran khusus untuk penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena kecukupan anggaran akan memperlancar jalannya implementasi kebijakan oleh sebab itu ketersediaan anggaran yang memadai akan memperlancar kegiatan/program serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam implementasi dari Peraturan Daerah itu sendiri terutama untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Di harapkan masyarakat lebih lagi peduli terhadap lingkungan dengan tidak membakar lahan ketika musim kemarau karena dampak yang timbul/dirasakan bukan hanya terjadi pada perorang namun mencakup keseluruhan dalam artian semua orang merasakan dampaknya.
4. Walaupun dengan adanya kearifan lokal, peneliti sangat berharap masyarakat dimana pun berada jika membuka lahan hanya untuk salah satu alternatif penyuburan tanah atau hanya untuk supaya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak sebaiknya masyarakat membuka lahan tanpa bakar seperti salah satu program/kegiatan yang disosialisasikan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengurangi dampak setiap tahunnya dari pembukaan lahan dengan cara membakar pada musim kemarau atau masyarakat bisa membuat Peraturan Desa yang mengacu pada pembukaan lahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mencatumkan hak, sanksi dan petunjuk teknis serta luasan lahan menurut adat/kebiasaan masyarakat setempat dengan melakukan musyawarah/diskusi bersama.

5. Diharapkan untuk Dinas terkait yang menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih giat lagi mensosialisasikan atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.
6. Di harapkan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ketika membuat Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat supaya ketika peraturan itu sudah menjadi Peraturan Daerah yang sah masyarakat sudah tidak lagi kaget/protes karena dari sebelum peraturan itu disahkan sudah ada sosialisasi langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung : Pustaka Setia
- <http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%206200KalTeng%202013.pdf> (diakses 15 Juni 2017)
- Komariah dan Satori . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Lexy, J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian Kulitatif*. Jakarta : Ghalia Industri
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2003 *Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*
- Peraturan Menteri P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 *Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*
- Subarsosno. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitaif–Bandung kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta

- Sumarjiyo dkk. 2008. *Bhaktiku Untuk Bumi Tambun Bungai*. Palangka Raya :
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Undang-Undang 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 *tentang Perkebunan*
- Wahab, Abdul Solichin H. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing